

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai darurat kesehatan global yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Maret 2020. Setelah menyatakan situasi, itu menjadi pandemi global. Status, 11 Juli 2020, 213 negara telah terjangkit penyakit ini, dengan angka kematian di seluruh dunia yang cukup tinggi dengan kematian total 1.686.267 berdasarkan total masalah 75.479.471 (WHO, 2020). Hampir semua industri terkena dampak pandemi COVID-19.

Covid-19 memang sudah dinyatakan sebagai endemi di Indonesia, tetapi dampak yang ditimbulkan dalam sektor ekonomi masih terjadi. Menteri keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa tahun 2023 ekonomi global akan mengalami resesi (CNN, 2022). Menurut Nathan Sheets selaku Kepala Ekonomi Global Citi Grup, bahwa dunia akan mengalami resesi sebesar 50% dalam 18 bulan ke depan (CNN, 2022). Terjadinya resesi dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan pendistribusian di sektor-sektor tertentu, terutama pada sektor sumber daya energi, mengalami gangguan.

Resesi adalah penurunan produk domestik bruto yang terjadi dalam satu tahun dan meningkatnya tingkat pengangguran (Shiskin, 1974). Dampak yang terjadi akibat resesi adalah pemutusan hubungan kerja yang tinggi dikarenakan penurunan pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,5% yang sebelumnya diproyeksikan 3,2% turun menjadi 2,7% (Detik.com, 2022). Pada tahun 2021 Kemenaker mencatat sudah 72.983 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (CNBC Indonesia, 2021). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan segera, agar ekonomi masyarakat tidak mengalami penurunan serta mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi resesi.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, dan melindungi masyarakat setempat dari risiko sosial yang mungkin timbul. menetapkan bahwa itu bertanggung jawab untuk Negara menggunakan anggaran negara yang dialokasikan (APBN) untuk pendapatan dan pengeluaran. Secara khusus, untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi dari risiko sosial, pemerintah memiliki program yang disebut Bantuan Sosial (BANSOS) dalam APBN. Bantuan sosial atau biasa disebut bantuan sosial adalah berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, cacat, atau rentan. (Peraturan Kemensos Nomor 20, 2019).

Data bansos dinyatakan tidak akurat karena terdapat kesalahan yang cukup signifikan di lapangan. Terbukti pada tahun 2020, kemensos alokasikan anggaran untuk 18,8 juta rumah tangga, tetapi penilaian menemukan bahwa hanya ada 13,2 juta rumah tangga. menerima bantuan sosial (Media Indonesia, 2021). BPK menyebutkan bahwa kesalahan penyaluran bantuan sosial mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,9 triliun.

Tabel 1.1

Tabel Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2018-2020 di Kota Surabaya

No.	Tahun	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial	Persentase Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial
1.	2018	72.590	58.434	80,5%
2.	2019	72.034	58.426	81,11%
3.	2020	118.378	98.502	83,21%

Sumber data: BPSI 2020

Tabel di atas menunjukkan hal ini pada tahun 2018. Angka persentase realisasi mencapai 80,05%. Pada tahun 2019 bisa mencapai 81.11%, dan naik lagi ke 83,21% pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh dari target karena Pemerintah Kota Surabaya menetapkan sebesar 98,27% untuk persentase realisasi jumlah keluarga penerima bansos setiap tahunnya (Surabaya.go.id). Tingkat realisasi pemberian bansos di Kota Surabaya pada tahun 2018 – 2020 masih belum memenuhi target.

Pengadaan bansos memiliki sejumlah permasalahan, salah satunya terkait dengan keakuratan data. Hal ini dibuktikan dengan temuan BPKP di mana terdapat data 3.877.965 data NIK penerima kesejahteraan tidak valid (Detik.com). Data ganda juga sering terjadi pada saat pemrosesan pendataan. Dilansir dari CNN, Menteri Sosial harus memangkas 53 juta data bansos ganda untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Terdapat dua warga Surabaya yang tidak menerima bantuan sosial. Mereka tidak mengerti bagaimana mekanisme pendataan dari Pemerintah Kota Surabaya, mereka harus hidup seadanya karena tidak pernah mendapatkan bantuan (Liputan 6, 2021). Hingga saat ini, isu pemutakhiran data masih menjadi kontroversi tidak hanya di kalangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Bahkan, Masih banyak orang yang tidak pantas mendapatkan bantuan sosial, tetapi masih mendapatkan bantuan sosial.

Efektivitas merupakan faktor penentu ketika tujuan atau tujuan yang telah ditentukan tercapai sebelumnya dalam suatu instansi, kegiatan atau program tersebut (Erfly Fernando Maun, Carly, 2020). Penggunaan sistem *website* memungkinkan efektivitas sistem tersebut, sehingga dapat membuat data yang terintegrasi dan lebih mudah diakses menggunakan *website*. Menurut Liao (2017), Web adalah sistem yang berhubungan dengan dokumen, digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dll melalui Internet. Syachbana dan Zulkarnain (2014) berpendapat, bahwa internet sudah Apalagi di Indonesia sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan internet dapat

menjadi faktor pendukung sistem *database* berbasis *website* dikarenakan *website* dapat diakses melalui *internet*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka kesenjangan dalam penelitian yaitu, penelitian oleh Junanda, Saputra dan Harmin (2020) yang meneliti tentang Rancang bangun sistem informasi bansos di kota Makassar Berbasis Web, sistem menggunakan metode *waterfall* di mana semua proses sistem yang berlangsung akan selalu terinput ke dalam *website* sehingga menimbulkan transparansi data di saat pendataan sampai penyaluran bantuan sosial, yang kemudian dapat menghindari terjadinya kecurangan.

Murti dan Praba (2020) merancang Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web Responsive. Sistem ini merancang pendataan penerima bantuan sosial menggunakan metode pemetaan wilayah berdasarkan tempat tinggal sehingga lebih efektif dalam melakukan pendataan, walaupun pasti tidak semua masyarakat kurang mampu berada pada lokasi yang sama. Didasari dari masalah yang ada dan penelitian terdahulu, desain sistem usulan akan dilaksanakan menggunakan sistem terintegrasi *database* berbasis *website* agar mempermudah pendataan, serta penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, Rumusan masalah dapat ditarik. Jadi terlihat seperti ini, “Bagaimana desain sistem E-registrasi penerima bansos Dinas Sosial kota Surabaya”.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam pendataan bantuan sosial agar lebih efisien.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Sosial, penelitian bermanfaat untuk mengefisiensikan proses pendataan penerima bantuan sosial serta penyaluran nya
2. Bagi masyarakat dan calon penerima bantuan sosial, agar masyarakat Surabaya khusus nya rakyat kurang mampu dapat menerima bantuan sosial tepat sasaran serta tepat waktu
3. Bagi dunia pendidikan, penelitian bermanfaat sebagai bahan diskusi atau referensi dalam hal sistem pemberian bantuan sosial.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian tentang sistem penerimaan bansos di Kota Surabaya. Keakuratan data menjadi masalah yang sering terjadi berakibat salah sasaran serta pembaharuan data yang sangat rumit karena tidak ada sistem yang mendukung semakin meningkatkan kemiskinan di masyarakat. Latar belakang tersebut menjadi dasar pemikiran penelitian yaitu rekomendasi sistem pendataan menggunakan metode *database* berbasis *web* yang dapat mempermudah proses pendataan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi landasan teori dalam penulisan serta temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya. Bab ini berisi teori-teori menjadi dasar dalam penelitian, yakni *agency theory* (Jansen dan Meckling, 1976), *operational information system* (Daniel dan Fitriani, 2018), *database management system* (Laudon dan Laudon, 2018), pengembangan sistem (Bodnar dan Hopwood, 2016), pengendalian internal (Romney dan Steinbart, 2018) dan Website (Liao, 2017). Bab ini juga membahas tentang kerangka berpikir menggambarkan seluruh penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang metodologi pengumpulan data sampai dengan pengolahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratori

dengan metode studi kasus yang dijelaskan oleh Yin (2017) dan Basuki (2016). Subjek penelitian adalah Dinas Sosial Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, observasi, dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam studi kasus.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang sistem informasi pendataan penerima bantuan sosial yang sedang berjalan saat ini dan evaluasi sistem tersebut. Bab ini juga membahas terkait rekomendasi sistem informasi pendataan penerima bantuan sosial dengan menggunakan sistem terintegrasi *database* berbasis *website* yang digambarkan melalui context diagram, data flow diagram (DFD), Entity relationship diagram (ERD). Kemudian akan dijelaskan sistem yang direkomendasikan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir penulisan penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan atau solusi yang akan diajukan kepada dinas sosial kota Surabaya. Hal tersebut diharapkan untuk dipertimbangkan, sebagai alternative bagi permasalahan yang ada.